

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DESA

Febrianus T. Egho^{1(a)}, I Putu Yoga Bumi Pradana^{2(b)}, Laurensius Petrus Sayrani^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana

^{a)}yoga.pradana@staf.undana.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

07-11-2023

Diterbitkan Online:

31-12-2023

Kata Kunci:

Gaya Kepemimpinan, Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

Keywords:

Leadership Style, Village Head, Community Participation, Village Development

Corresponding Author:

yoga.pradana@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan beserta faktor dibalik kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa dan mengetahui tahapan partisipasi masyarakat di Desa Tarawali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil temuan menunjukkan bahwa: 1) gaya kepemimpinan yang dinilai dari pembangunan irigasi, jalan tani, dan rumah ibadah Desa Tarawali memiliki komunikasi yang cukup baik, tanggung jawab cukup baik, dan motivasi dengan baik, namun rata-rata partisipasi masyarakat masih kurang karena peran kepemimpinan kepala desa dianggap belum optimal; 2) jenis partisipasi masyarakat di Desa Tarawali yaitu partisipasi inisiatif, legitimasi, dan eksekusi. Penelitian ini membahas mengenai gaya kepemimpinan terkait dengan fokus komunikasi, tanggung jawab, dan motivasi. Adapun kebaruannya adalah penelitian ini membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor dibalik kurang optimalnya proses pembangunan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi jenis partisipasi masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan instrumen pertanyaan yang sederhana.

ABSTRACT

This research aims to determine the leadership style and the factors behind the village head's leadership in increasing community participation in village development and to determine the stages of community participation in Tarawali Village. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The selection of informants used a purposive sampling technique. The findings show that: 1) the leadership style as assessed by the construction of irrigation, farming roads and houses of worship in Tarawali Village has quite good communication, good responsibility and good motivation, but on average, community participation is still lacking due to the leadership role the village head is considered not optimal; 2) types of community participation in Tarawali Village, namely initiative participation, legitimacy and execution. This research discusses leadership styles related to communication focus, responsibility and motivation. The originality is that this research discusses the factors behind the less-than-optimal development process in more depth. In addition, this research identifies types of community participation. This research has limitations in the number of informants and simple question instruments.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i4.160>

PENDAHULUAN

Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substansi, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (UU No. 25 tahun 2004, 2004).

Dengan spirit “Membangun Ngada dari Desa” penyusunan RKPD Tahun 2018 ini bertekad untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Ngada : “Terwujudnya Masyarakat Ngada Dengan Taraf Hidup Yang Berkualitas, Mandiri, Berbudaya, Unggul, Dan Sejahtera Berlandaskan Etos Kerja Yang Tinggi Dan Pembangunan Berkelanjutan” serta mencapai tujuan dari ketujuh Misi Pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2016 - 2021. Penyusunan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2018 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, *top-down* dan *bottom-up*, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan cara mengedepankan pencapaian visi dan misi RPJMD 2016 - 2021. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten (RKPD Kabupaten Ngada, 2018).

Kepala Desa mempunyai peran sebagai seorang pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri selain itu Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan tertinggi di tingkat desa yang berhubungan langsung

dengan masyarakat sehingga Kepala Desa sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan di desa. Desa Tarawali merupakan salah satu Desa di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada yang dipimpin oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara baik. Terhitung dari tahun 2016-2019 Desa Tarawali memiliki 228 KK yang tersebar dalam 4 Dusun dan 14 RT dengan total jumlah penduduk mencapai 1.186 jiwa. Agar penyelenggaraan desa ini dapat dilakukan dengan baik, pemerintah desa harus didukung oleh unsur dunia usaha dan masyarakat. Partisipasi masyarakat desa harus dioptimalkan, baik dalam bentuk pemberian ide atau gagasan, maupun partisipasi dalam bentuk keterampilan, sosial, uang, harta benda, dan tenaga (BPS, 2020).

Hasil observasi awal penulis menunjukkan bahwa pembangunan fisik desa di Desa Tarawali, Kecamatan Soa pada tahun 2016 – 2019 berjalan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, hal ini dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan fisik desa (pembangunan irigasi, jalan tani, dan rumah ibadah). Pada pembangunan irigasi di persawahan Radewea hanya 30 KK yang berpartisipasi, 198 KK tidak berpartisipasi, pada pembangunan jalan tani di Kampung Tarajawa hingga persawahan Radawea hanya 80 KK yang berpartisipasi, sebanyak 148 KK tidak berpartisipasi, pada pembangunan rumah ibadah di Kampung Tarawaja hanya 120 KK yang berpartisipasi, 180 KK tidak turut serta.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan bahwa kurangnya angka partisipasi masyarakat di Desa Tarawali Kecamatan Soa Kabupaten Ngada sangatlah rendah, hal tersebut di akibatkan karena: 1) terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional dan terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (*internal*) maupun sumber dana dari luar (*eksternal*); 2) belum tersusunya kelembagaan sosial ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; 3) tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga berdampak pada banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap

pembangunan desa; dan 4) terlalu mengandalkan pihak pemerintah desa dalam penyelesaian program pembangunan desa dianggap dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, terutama masyarakat yang masih produktif yang seharusnya memiliki inovasi dan inisiatif dalam program pembangunan.

Penulis menyimpulkan penyebab dari kurangnya partisipasi disebabkan oleh gaya kepemimpinan kepala desa. seorang kepala desa tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat harus seiring sejalan agar tercipta suasana kondusif harmonis sehingga cita-cita menjadikan desa semakin baik dan bisa terwujud. Sebagai kepala desa perannya sangat berpengaruh besar pada pelaksanaan pembangunan di desa, dan akan terwujud apabila didukung oleh situasi dan kondisi yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa. Pembangunan akan berhasil apabila peranan kepala desa dapat dimainkan dengan baik dan dapat didukung oleh partisipasi seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui gaya kepemimpinan Kepala Desa Tarawali dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan 2) mengetahui jenis partisipasi masyarakat di Desa Tarawali. Tujuan ini yang menjadi keperbaharuan dari penelitian sebelumnya (Bagus & Sasmito, 2021; Hariati, 2018; Rahman, 2021). Penelitian sebelumnya belum mengkaji mengenai sub fokus komunikasi, tanggung jawab, dan motivasi serta faktor penghambat dibalik kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tarawali.

Lebih jauh lagi, Stoner (dalam Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial dimana manajer mencari keikutsertaan sukarela dari bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Ghufron, 2020). Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang atau sekumpulan orang untuk mengajak dan menimbulkan motivasi kepada orang-orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar upaya

mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Pasaribu et al., 2022; Thoha, 2007).

Lebih lanjut, Riadi (2019) menguraikan Gaya kepemimpinan sebagai suatu cara, pola dan kemampuan tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi dan berinteraksi untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan agar bisa melakukan suatu pekerjaan sehingga mencapai suatu tujuan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya, dan bukan suatu keharusan bahwa suatu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih buruk dibanding gaya kepemimpinan lainnya (Riadi, 2019). Kartono (2008) menyatakan gaya kepemimpinan seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) kemampuan mengambil keputusan; 2) kemampuan memotivasi; 3) kemampuan komunikasi; 3) kemampuan mengendalikan bawahan; 4) tanggung jawab; dan 5) kemampuan mengendalikan emosional.

Lebih jauh lagi, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen kegiatan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan (Riadi, 2019). Dalam konteks partisipasi masyarakat, partisipasi merupakan kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan (Riadi, 2019). Bila dilihat dari bentuk dan tahapan partisipasi, maka tahapan partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Hoofsteede (dalam Sumarna, 2016), dalam hal ini membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, antara lain : 1) partisipasi inisiasi (*inisation participation*); 2) partisipasi legitimasi (*legitimation participation*); dan 3) partisipasi eksekusi (*execution participation*).

Sehubungan dengan pembangunan pedesaan, Kartasasmita (2001) mengatakan bahwa pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan pembangunan perkotaan meskipun unsur-unsurnya kurang lebih sama saja, yang meliputi empat upaya besar yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu: 1) Memberdayakan ekonomi masyarakat desa; 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat

produktivitas dan daya saing; 3) Pembangunan Prasarana; 4) Pembangunan kelembagaan pedesaan.

Pembangunan di desa berfungsi sebagai pancingan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang ada di desa dengan memberdayakan tenaga kerja yang ada di desa sekaligus sebagai program pengurangan pengangguran. Dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih baik dan dapat menggugah semangat warga desa untuk membangun desa, sehingga menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Kartono (2008) dan Hoofsteede (dalam Sumarna, 2016)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti karena permasalahan yang diangkat oleh peneliti membutuhkan keterangan-keterangan yang cukup mendalam dari narasumber yang mengetahui mengenai gaya kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur Desa Tarawali. Pendekatan deskriptif dipilih oleh peneliti karena dapat mempermudah peneliti mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti secara lebih mendalam.

Sumber data primer berasal dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur atau bahan Pustaka. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles & Huberman (1992) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah itu dilakukan triangulasi data, menurut Sugiyono (2015) triangulasi data merupakan teknik

pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Triangulasi data menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Teknik penentuan informan dalam penentuan ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan/ informasi yang cukup tentang Gaya Kepemimpinan kepala desa, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Kaur Desa	3 Orang
4.	Kepala Seksi	2 Orang
5.	Kepala Dusun	4 Orang
Jumlah		15 Orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya Kepemimpinan dalam Proyek Pembangunan Irigasi, Jalan Tani, dan Rumah Ibadah pada Tahun 2016-2019 di Desa Tarawali Kecamatan Soa Kabupaten Ngada

Pembangunan irigasi di persawahan Radawea pada saat ini (tahun 2023) sudah selesai dibangun, pembangunannya dilakukan dengan cara memindahkan atau membangun ulang bendungan di tempat/dataran yang lebih tinggi sehingga debit air di persawahan Radawea saat ini sudah normal kembali. Namun yang dilihat di sini adalah pembangunannya pada tahun 2016-2019 yang mana pembangunan tersebut masih terkesan tidak optimal. Belum optimalnya pembangunan tersebut berakibat dari kurang baiknya komunikasi, dan motivasi yang belum kuat antara pihak pemerintah hingga sifat acuh tak acuh yang mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi rendah baik dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi.

Permasalahan pada jalan tani dan rumah ibadah yakni, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembangunan jalan tani hanya untuk kepentingan kelompok yang mana hal ini menciptakan sebuah kondisi yang tidak harmonis dalam pelaksanaannya.

Pembangunan rumah ibadah di Desa Tarawali dipandang perlu dilakukan pemerintah karena kebutuhan masyarakat dari segi religius butuh perhatian yang serius. Pembangunan rumah ibadah ini menjadi pembangun rumah ibadah kedua setelah sebelumnya di bangun rumah di dusun Wuli lade. Rumah ibadah ini berupa kapela yang mana di Desa Tarawali terdiri atas dua kapela yang tergabung dalam Stasi ST. Emanuel Tarawali. Peran pemerintah sebagai aktor untuk menggerakkan masyarakat menjadi faktor penting bagaimana program itu terlaksana sebagaimana mestinya. Peran pemerintah dinilai sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan Partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai pada saat pelaksanaan dan evaluasi diharapkan dapat ditingkatkan sehingga pembangunan ini bisa segera terlaksanakan dengan sebaik mungkin.

Oleh karena itu peran kepemimpinan dalam pembangunan irigasi, jalan tani, dan rumah ibadah adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan

Partisipasi masyarakat pada saat perencanaan cukup banyak yang terlibat aktif atau bisa di katakan pada tahap perencanaan ini partisipasi masyarakat cukup baik, yang mana banyak masyarakat yang berjuang untuk bagaimana pemerintah harus bisa merealisasikan apa yang di harapkan masyarakat. Penggalan gagasan mulai di lakukan dan berlanjut hingga pada saat pengambilan keputusan yang menjadi awal dari rendahnya partisipasi masyarakat, peran pemerintah harus bisa meredam keadaan sehingga pewarisan *knowledge* dapat terwujud. Tahapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan proyek pembangunan irigasi di nilai masih cukup rendah, karena dalam perencanaan tersebut keterlibatan masyarakat sangat sedikit. Pembangunan jalan tani dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Sedangkan, perencanaan pembangunan rumah ibadah dilakukan oleh BPD berdasarkan gagasan dari masyarakat. Oleh karena itu peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan jalan tani, irigasi, dan rumah ibadah dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, komunikasi. Dalam kasus irigasi pemimpin dan masyarakat harus mempunyai dasar pemahaman yang baik terhadap apa itu partisipasi dalam pelaksanaan musyawarah mufakat yang kemudian menjadi bahan

pertimbangan pemerintah tentang bagaimana arah pembangunan kedepannya. Cakupan komunikasi yang dilakukan pemerintah dianggap bermasalah, yang mana cakupan yang di maksud adalah tidak adanya dialog pembangunan antara masyarakat sebagai tujuan pembangunan dan pemerintah sebagai aktor dari pembangunan itu sendiri. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan ibu YLW selaku Kaur Umum dalam wawancara 15 Juli 2023:

“...Terkesan tidak komunikasi terkait perencanaan pembangunan irigasi di Desa Tarawali pada saat itu, masyarakat hanya menerima informasi bahwa akan ada perbaikan got air di persawahan Radawea. Masyarakat menganggap kalau proyek itu adalah proyek dari pemerintah kabupaten, dan pada saat musyawarah banyak masyarakat yang tidak hadir. Kebanyakan yang hadir hanya anggota BPD dan aparat desa saja”.

Komunikasi yang dibangun pemerintah dalam pembangunan jalan tani dinilai cukup baik karena dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang terlibat dalam mengambil bagian pada tahap perencanaan ini. Hal ini didukung dengan wawancara bersama GH selaku kasi keuangan pada wawancara 10 Juli:

“...Hampir seluruh masyarakat turut hadir dalam penyampaian gagasan dan usul saran pada saat musyawarah dilakukan, masing-masing sampai pada saat keputusan itu dibuat diwarnai dengan sedikit keributan karena sebagian masyarakat menganggap keputusan itu hanya mementingkan kelompok atau golongan tertentu”.

Komunikasi pemerintah pada saat pembangunan rumah ibadah dinilai cukup baik, karena meskipun tidak semua masyarakat terlibat dalam partisipasi tetapi penerimaan yang baik dalam masyarakat menunjukkan bahwa komunikasi ini berjalan lancar. Komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa adalah dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga, hal ini cukup efektif karena masyarakat menerima informasi langsung dari pemerintah itu sendiri, namun hal ini terkesan tidak terciptanya rasa kepercayaan antara tubuh pemerintah sehingga terkesan dalam penyampaian informasi ini kepala desa bekerja sendiri. Wawancara 11 Juli bersama bapak MR

selaku kepala dusun Tarawaja mengatakan bahwa:

“...Hal ini dinilai menjadi masalah sebagian orang saja, jika dipaksa untuk di perbaiki maka akan menimbulkan masalah baru lagi. Jangankan masyarakat, aparat juga banyak yang tidak memahami apa arti dari perannya sebagai penunjang atau atribut Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai kepala pemerintahan desa. Jika di tanya apa itu partisipasi, maka jawabannya adalah terlibat bekerja secara fisik, ide dan gagasan hanya menjadi tugas BPD dan sebagian masyarakat yang punya kemampuan di bidang pemerintahan desa”.

Kedua, tanggung jawab. Bila dilihat dari segi perencanaan irigasi pemerintah desa di nilai kurang bertanggung jawab. Alasannya karena dalam suatu pembangunan tentunya masing-masing anggota atau kelompok memiliki usul dan sarannya masing-masing demi menjadikan desa semakin maju dengan pandangan mereka masing-masing. Pemerintah seperti bersifat otoriter dengan membatasi hak usul saran dari masyarakat, hal ini di nilai sebagai salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan irigasi di desa Tarawali. Wawancara bersama bapak YPG selaku Kepala Dusun Wulilade 1 pada wawancara 11 Juli:

“...Bukan mau menyalahkan pemerintah atau sebaliknya, pada saat itu terdapat beberapa tokoh masyarakat yang merasa keberatan dengan pembangunan irigasi di Radawe, alasannya karena kondisi bendungan dan sebagian saluran saat itu akan sulit di perbaiki karena kerusakannya itu cukup parah. Tetapi kepala desa dan beberapa aparat tetap memaksa agar tetap harus di jalankan dengan cara mengambil keputusan sepihak.”

Berbeda dengan pembangunan jalan tani, pemerintah bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, hal ini dapat dilihat bahwa peran pemerintah sudah dijalankan dengan baik meskipun banyak masyarakat yang menganggap bahwa keputusan itu lebih memihak kepada kepentingan golongan atau kelompok. Menanggung akibat seperti apa yang akan terjadi ke depan sudah disiapkan oleh pemerintah dimana jika kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan mempengaruhi partisipasi. Wawancara 10 Juli

bersama bapak AB selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“...Pada saat itu saya masih menjadi aparat dan saya melihat bahwa pemerintah tidak menunjukkan keberpihakannya kepada siapa-siapa dan murni keputusan untuk membangun jalan tani adalah demi kebaikan bersama. Hanya saja masyarakat yang tidak mampu mengalahkan ego di dalam diri bahwa tujuannya adalah untuk demi kepentingan bersama.”

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan rumah ibadah sudah ada tim yang di percayakan sebagai tim penyusun kegiatan yang kemudian di namai dengan tim 11 (sebelas) dan diawasi langsung oleh BPD. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap masyarakat agar dengan apa yang sudah di programkan boleh berjalan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan. Dalam wawancara bersama bapak AB selaku Kepala Desa pada tanggal 18 Juli:

“...Semua masyarakat dan aparat di libatkan, hanya saja dalam tahapan ini sudah di mandatkan pada tim 11 (sebelas) atau tim penyusun kegiatan. Untuk aspek pengendalian tentu sudah ada lembaga yang di percayakan oleh masyarakat yaitu BPD untuk melakukan pengawasan atau pengendalian”.

Ketiga, motivasi. Motivasi pemerintah dalam pembangunan irigasi dinilai cukup rendah. Pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan hanya menjadi wacana dalam masyarakat, karena poin-poin yang di bahas tidak dapat di jangkau masyarakat, sehingga berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat pada saat musyawarah atau partisipasi dalam proses perencanaan itu dilangsungkan. Hadirnya pemerintah seharusnya menjadi penawar dari permasalahan ini, namun karena rendahnya motivasi tersebut membuat kesenjangan antara ketidaktahuan terhadap perencanaan makin jauh. Wawancara bersama bapak HD selaku sekretaris desa pada wawancara 14 Juli 2023:

“...Masyarakat tidak mengerti fungsi dari perencanaan pembangunan, yang masyarakat tahu hanya kalau hadirnya mereka hanya mau dengar apa yang di sampaikan petugas tentang proyek apa yang akan di kerjakan, bahkan ketika diminta untuk bertanya saja semua tidak ada yang

mau bertanya. Pemerintah seharusnya tahu kalau masyarakat memang memiliki kelemahan di bagian itu “kurang komunikatif”, ini yang membuat masyarakat tidak mau ikut rapat. Karena percuma hadir kalau ke sana hanya pergi setelah itu tidak berbuat apa-apa.”

Pada pembangunan jalan tani motivasi yang ada di dalam pemerintah adalah bagaimana masyarakat bisa dipermudah dalam menjalankan tugas keseharian sebagai petani, namun pandangan berbeda justru terlihat dalam diri masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan yang harus di selesaikan pemerintah. Pada dasarnya pembangunan itu didasarkan atas kebutuhan masyarakat, hanya saja masyarakat tidak memahami apa maksud dari pemerintah. Wawancara 10 Juli bersama bapak AB selaku kepala desa juga mengatakan bahwa:

“...Kami sebagai masyarakat pada saat itu melihat bahwa terjadinya pembangunan itu didorong oleh kepentingan golongan yang ada di dalam tubuh pemerintah, soalnya pembangunan itu terkesan tergesa-gesa dan tidak akomodir yang baik dari pemerintah yang mana hasil dari pembangunan itu nantinya hanya untuk kepentingan sebagian masyarakat saja.”

Di sisi lain, pembangunan rumah ibadah didorong untuk meningkatkan kadar religius di dalam masyarakat dianggap menjadi motivasi perencanaan pembangunan tersebut. Ini menunjukkan bahwa loyalitas pemerintah terhadap masyarakat cukup baik dan dengan demikian kedepannya masyarakat bisa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi kemajuan bersama. Wawancara 11 Juli bersama bapak HD sebagai sekretaris desa mengatakan bahwa:

“...Kesadaran masyarakat yang membawa pembangunan desa menjadi jauh semakin baik seperti saat ini, pemerintah juga selalu mendukung dengan memfasilitasi masyarakat untuk sama-sama mendorong pembangunan desa.”

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa harus dapat mengkoordinasikan segala atribut terkhususnya pada pelaksanaan irigasi yang telah dianggarkan. Namun dalam kenyataannya pemerintah kurang optimal dalam menggerakkan masyarakat pada saat

pelaksanaannya, hal ini menjadi pemicu rendahnya partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan karena peran pemimpin yang kurang berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

Realisasi pembangunan jalan tani hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat yang mana masyarakat yang terlibat ini adalah orang-orang yang pro terhadap keputusan pemerintah. Otoritas seperti ini di nilai cukup baik, namun harus ada penyesuaian antara pemerintah dan masyarakat, sehingga bila mana ada hal-hal yang sifatnya menghambat suatu pembangunan dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Lebih lanjut, pelaksanaan pembangunan rumah ibadah ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalam desa. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian adalah di desa Tarawali sendiri terbagi menjadi dua wilayah kapela yang mana selain yang di bangun di dusun Tarawaja, sebelumnya sudah ada kapela di dusun Wuli Lade. Hal ini menyebabkan ada beberapa masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pelaksanaan, peran pemerintah diharapkan menjadi agen pemersatu di dalam tatanan kehidupan masyarakat desa.

Pertama, komunikasi. Komunikasi yang di lakukan pemerintah seolah-olah terkesan terpaksa karena dalam pelaksanaannya program pembangunan irigasi yang di cita citakan sangat berbeda dengan kenyataan yang di harapkan. Keterpaksaan ini sebagai akibat dari bentuk realisasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dan perbedaan tersebut yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat pada program pembangunan irigasi di desa Tarawali yang terjadi di persawahan Radawea. Dalam wawancara bersama bapak YP selaku Kepala Dusun Wulilade 1 pada wawancara 15 Juli sebagai berikut:

“...Kami sebagai kepala dusun sebagai salah satu aktor pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kendala pada waktu pelaksanaan pembangunan irigasi waktu itu adalah banyak masyarakat yang tidak menerima kekeliruan komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga kami sebagai aparat terpaksa terjun langsung untuk kerja dan hanya beberapa masyarakat yang terlibat.”

Komunikasi yang baik menciptakan dialog yang baik pula, dalam kasus jalan tani

pemerintah sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat. Namun masyarakat belum mampu menerima keputusan yang di buat pemerintah dan tidak mampu menerjemahkan hal tersebut sebagai bentuk terselenggaranya pemerintah desa yang lebih baik. Wawancara bersama ibu YLW selaku KAUR Umum Desa Tarawali pada wawancara 12 Juli 2023:

“...Semua hal yang di lakukan pemerintah desa sudah baik, hanya saja ada beberapa kekeliruan pada saat pengambilan keputusan atau penentuan titik pembangunan seakan akan memihak kepada kepentingan kelompok atau golongan, yang kemudian menciptakan kondisi di mana masyarakat merasa usul dan sarannya tidak akan di terima atau pasti akan ada usul saran lain yang akan diprioritaskan untuk kelompok berkepentingan saja.”

Sedangkan, pada pembangunan rumah ibadah komunikasi yang dilakukan pemerintah dinilai cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus dipupuk rapi oleh pemerintah bahwasanya pembangunan di dalam desa adalah tanggung jawab bersama. Komunikasi yang baik akan menciptakan suasana yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, terciptanya dialog yang baik membutuhkan tuntunan dan tata cara yang benar pula. Wawancara 10 Juli bersama AB selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“...Pemerintah menyadari betul permasalahan seperti ini, namun sejauh ini kami masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya dan yang dapat di lakukan saat ini adalah tidak melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembicaraan, tujuannya hanya untuk mengurangi hal-hal yang tidak di inginkan yang di anggap dapat menimbulkan situasi tidak ideal dalam pembicaraan mengenai program pembangunan yang ada”.

Kedua, tanggung jawab. Seperti yang telah dijelaskan bersedia menanggung akibat harus ditunaikan. Pembangunan irigasi di persawahan Radawea menjadi sesuatu yang harus diperhatikan lebih serius, karena kesenjangan tersebut menjadikan refleksi bersama agar kedepannya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Seperti yang telah di jelaskan, hal tersebut kemudian di perkuat dengan wawancara terhadap bapak MR selaku Kepala Dusun Tarawaja pada wawancara 11 Juli:

“...Kami sebagai kadus juga merasakan bagaimana peran aktif pemerintah untuk bahu membahu bersama kami dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, hal ini terjadi karena masyarakat banyak yang tidak terlibat.”

Kemampuan mengendalikan bawahan adalah tanggung jawab pemerintah di mana pemerintah harus bisa menjaga dan merawat sumber daya yang ada di dalam desa. Partisipasi menjadi salah satu sumber daya utama di dalam pembangunan menjadi sorotan utama dalam pembangunan jalan tani, dimana pemerintah bersedia menerima dan memikul tanggung jawab atas rendahnya partisipasi masyarakat. Berikut wawancara bersama Bapak HD selaku sekretaris desa pada wawancara 08 Juli:

“...Dari masing-masing usul dan saran, ide dan gagasan tidak mampu di akomodir dengan baik oleh pemerintah, sehingga berkesan masyarakat yang tidak turut terlibat dikarenakan kurang mempercayai pemerintah pada saat pengambilan keputusan dan jalan tengah (keadilan) berkesan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan”.

Menanggung segala risiko adalah peran pemerintah dalam meningkatkan loyalitas agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Nilai-nilai tanggung jawaban ini tidak hanya sebagai wacana karena meskipun tidak semua masyarakat yang berpartisipasi, pemerintah tetap memfasilitasi pelaksanaan pembangunan rumah ibadah ini sampai selesai terbangun. Wawancara 10 Juli bersama AB selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“...Dalam proses pembangunan fisik di desa, seorang pemimpin harus seirama antara kata dan perbuatan, artinya: pemimpin ketika berbicara harus terlebih dahulu berbuat (memberi contoh) terutama di bidang pembangunan fisik, pemimpin harus memberikan tunjuk teladan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik kepada pemerintah atau masyarakat setempat sebelum ia memerintahkan masyarakat untuk bekerja.”

Ketiga, motivasi. Motivasi yang mendasari pelaksanaan pembangunan irigasi di Desa Tarawali adalah sebagai bentuk nyata dorongan membangun dalam tubuh pemerintah desa,

namun dalam pelaksanaan tersebut masih banyak yang harus di perbaiki akibat kurangnya kompetensi yang ada di dalam diri pemerintah. Pembangunan yang terkesan tidak ada persiapan tersebutlah yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Wawancara bersama ibu TOD selaku kasi Kesra pada wawancara 13 Juli:

“...Pembangunan tersebut dianggap seperti membuang buang waktu oleh masyarakat, sehingga pemerintah termotivasi agar pembangunan itu tidak berjalan sesuai apa yang di harapkan tetapi dengan adanya pembangunan yang bersifat sementara itu dapat meningkatkan debit air, meskipun tidak begitu besar seperti apa yang di harapkan masyarakat pada umumnya.”

Motivasi yang dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa berpartisipasi adalah dengan memberikan HOK (harian orang kerja), meskipun tidak seberapa namun hal ini di harapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menunjang pembangunan jalan tani. Wawancara bersama bapak SBN selaku kasi pembangunan pada wawancara 12 Juli:

“...Dalam memotivasi masyarakat, Kepala Desa sering kali menarik simpati masyarakat, yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat lain agar tergugah dengan apa yang di lakukan oleh anak-anak mereka sendiri. Selanjutnya dengan memanfaatkan HOK untuk memotivasi masyarakat, hal ini di lakukan sebagai reward dari sumbangsih masyarakat terhadap pembangunan fisik desa dalam bentuk tenaga dan keahlian.”

Segera merealisasikan pembangunan rumah ibadah tersebut menjadi motivasi pemerintah. Pemerintah mendorong masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam masyarakat, pembangunan pun benar-benar hanya mengandalkan tenaga masyarakat dan tidak menggunakan tenaga luar mana pun. Dalam penerapannya Kepala Desa sering memotivasi masyarakat dengan memanfaatkan tenaga kaum muda yang lebih berpotensi untuk menyadarkan masyarakat desa secara lebih luas. Selain cara tersebut pemerintah dalam menarik partisipasi masyarakat adalah dengan menggunakan upah HOK (hari orang kerja), konsekuensinya adalah dengan tidak menggunakan tenaga ahli dari luar dan kembali

memanfaatkan potensi atau kemampuan masyarakat yang dianggap punya bakat atau pengalaman dalam bidang pembangunan yang di maksud. Wawancara bersama bapak FW selaku Kepala Dusun Wulilade pada wawancara 10 Juli mengatakan bahwa:

“...Dalam memotivasi masyarakat, Kepala Desa sering kali menarik simpati masyarakat melalui OMK (orang muda Katolik) yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat lain agar tergugah dengan apa yang di lakukan oleh anak-anak mereka sendiri. Selanjutnya dengan memanfaatkan HOK untuk memotivasi masyarakat, hal ini di lakukan sebagai reward dari sumbangsih masyarakat terhadap pembangunan fisik desa dalam bentuk tenaga dan keahlian.”

c) Evaluasi

Evaluasi yang di maksud adalah untuk menilai bagaimana peran pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan irigasi, yang hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting agar kedepannya kesalahan atau kekurangan pada saat pembangunan ke depan pemerintah sudah dalam keadaan lebih baik dalam mengkoordinasi masyarakat. Tingkat partisipasi ini dinilai rendah karena banyak atau sebagian besar masyarakat tidak terlibat didalamnya. Hal ini seperti menjadi pernyataan sikap dari masyarakat yang menilai bahwa pemerintah kurang kompeten dalam mengkoordinasikan masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan proyek irigasi.

Penilaian yang dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah bersama masyarakat sama-sama menilai peran dan tanggung jawab serta bagaimana keberhasilan pembangunan itu di capai sesuai dengan tujuan dibangunnya jalan tani tersebut. Masyarakat menilai bahwa pemerintah sangat otoriter dengan ditegaskan keputusan pembangunan tersebut meskipun banyak pihak yang tidak terlibat. Dalam evaluasi ini pula banyak masyarakat yang berpartisipasi untuk mengetahui tujuan apa saja yang ingin dilakukan pemerintah sehingga pembangunan itu tetap terlaksana meskipun tingkat partisipasinya cukup rendah. Peran kepala desa dalam evaluasi pembangunan rumah ibadah juga akan menjadi sebuah penilaian apakah dengan segala permasalahan yang ada pemerintah mampu atau tidak menjalankan tugas kepemimpinannya.

Pertama, komunikasi. Komunikasi kepala desa pada saat evaluasi pembangunan irigasi di

nilai cukup baik. Meskipun dalam pelaksanaan program tersebut terkesan memaksa namun sebagai kepala pemerintahan, komunikasi tetap di jalankan agar masyarakat dapat menyampaikan kritikan maupun masukan kepada pemerintah. Namun dengan demikian masyarakat menunjukkan sikap apatis di mana hal tersebut di tunjukan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada saat evaluasi ini. Seperti yang di jelaskan pada wawancara 11 Juli bersama bapak MR selaku kepala dusun Tarawaja mengatakan bahwa:

“...Evaluasi selalu dilakukan pemerintah dalam menutup sebuah kegiatan, apa pun itu kegiatannya. Namun pada saat itu evaluasi tentang pembangunan got air ini banyak masyarakat yang beralasan kalau mereka masih sibuk di sawah atau ladang dan mengabaikan kegiatan tersebut”

Komunikasi pemerintah pada saat evaluasi pembangunan jalan tani cukup baik, karena meskipun partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan cukup rendah tetapi pemerintah tetap berkomunikasi baik dengan masyarakat. Komunikasi yang baik ini harus tetap dipertahankan agar di kemudian hari pewarisan ilmu pengetahuan masyarakat dapat di perbaiki dan menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan ada karena masyarakat dan pelaksanaannya membutuhkan partisipasi masyarakat. Wawancara terhadap bapak YPG selaku Kepala Dusun Wulilade 1 pada wawancara 11 Juli:

“...Dalam proses pembangunan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dan dalam beberapa kegiatan baik pembangunan infrastruktur maupun bidang pembinaan masyarakat desa. Hal itu biasanya juga di sampaikan pada saat rapat desa, Musdes, maupun Musrengbangdes, tujuannya untuk mengingatkan masyarakat agar masyarakat mengerti apa saja tujuan dari pada pembangunan tersebut dan selalu disosialisasikan juga prioritas pembangunan kepada masyarakat agar tidak terjadinya kecemburuan di masing-masing wilayah Dusun yang dapat memicu ketidakaktifan masyarakat pada program pembangunan tersebut”.

Peran pemimpin dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat dilihat dari indikator komunikasi pada tahap evaluasi. Komunikasi evaluasi pembangunan rumah ibadah dilakukan

dengan cukup baik oleh pemerintah, yang mana dalam evaluasi tersebut penilaian kinerja semuanya dilakukan. Wawancara tanggal 08 Juli bersama bapak DM sebagai kepala dusun Tarawaja 1 mengatakan bahwa:

“...Inisiatif masyarakat dalam usulan pembangunan swadaya sangat beragam namun BPD punya perhitungan tentang seberapa besar peluang untuk terealisasinya usulan dan pembangunan apa saja yang harus di dahulukan, mekanismenya pun hampir sama dengan pembangunan fisik yang berasal dari dana desa. Perbedaan keduanya terletak pada lama waktu yang di gunakan dan seberapa besar volume pembangunan, karena dana yang ada cenderung lebih kecil dan dengan terpaksa pembangunannya pun harus dilakukan bertahap.”

Kedua, tanggung jawab. Meskipun terkesan gagal, namun pemerintah siap menerima segala yang terjadi dengan cara melakukan evaluasi. Evaluasi ini sebagai bentuk refleksi bersama agar kedepannya kesalahan-kesalahan serupa tidak terjadi lagi, namun demikian banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dan beralasan masih sibuk bekerja di sawah ataupun ladang. Hal ini di perkuat dengan wawancara tanggal 08 Juli bersama bapak DM sebagai kepala dusun Tarawaja 1 mengatakan bahwa:

“...Evaluasi itu memang benar ada, namun ada dan tidaknya evaluasi itu seperti sebuah kekosongan karena banyak masyarakat yang tidak mau terlibat”.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap berjalannya pembangunan jalan tani, dilihat dari tanggung jawab pemerintah pada saat evaluasi adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat agar masukan dan pendapat dapat di sampaikan demi kebaikan pembangunan di masa mendatang. Wawancara bersama bapak FW selaku Kepala Dusun Wulilade pada wawancara 10 Juli mengatakan bahwa:

“...Kepala desa bersama aparat turut serta bertanggung jawab atas apa saja yang menjadi kekurangan dalam proses pelaksanaan proyek jalan tani dan menjelaskan maksud dari apa yang dilakukan pemerintah yang terkesan bersifat otoriter”.

Pemerintah dalam pemerintahannya bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beragama, yang mana peran pemerintah sebagai fasilitator harus mampu menyediakan tempat ibadah untuk masyarakat. Wawancara 10 Juli bersama bapak AB selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“...Pembangunan swadaya ini menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan rohani, dalam perencanaannya tempat ibadah ini menjadi salah satu bentuk fasilitas yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama di dalam masyarakat desa.”

Ketiga, motivasi. Sumber daya yang rendah dan menganggap mengkritisi adalah hal yang negatif pula menjadikan tingkat partisipasi ini menjadi cukup rendah. Ketidakterlibatan ini harusnya menjadi bentuk masukan bahwa seharusnya ada koordinasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah agar kerja sama ini menjadi lebih baik kedepannya. Kurangnya motivasi masyarakat menyebabkan evaluasi tidak berjalan dengan semestinya. Wawancara tanggal 08 Juli bersama bapak DM sebagai kepala dusun Tarawaja 1 juga mengatakan bahwa:

“...Masyarakat yang terlibat pada saat itu adalah masyarakat yang ikut bekerja pada saat penambalan itu di lakukan. Bukan bermaksud mau menghakimi, tapi sikap masyarakat jika seperti ini terus saya sangat yakin kedepannya dampak baik dari pembangunan hanya sebatas fungsi pembangunan saja dan masyarakat tidak akan mendapatkan pengetahuan apa-apa.”

Faktor yang mendorong pemerintah dari segi motivasi pemerintah terhadap evaluasi kinerja adalah bagaimana menilai kinerja sesama aparat yang menyebabkan partisipasi masyarakat pada evaluasi jalan tani menjadi rendah. Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka agar tumpang tindih informasi yang berdampak pada berbeloknya pandangan masyarakat harus di perbaiki agar tercipta suasana yang harmonis di dalam masyarakat. Wawancara 11 Juli bersama bapak HD sebagai sekretaris desa mengatakan bahwa:

“...Pemerintah selalu memotivasi masyarakat dengan berbagai cara, dalam hal evaluasi tersebut pemerian HOK sebagai reward kepada masyarakat yang

terlibat pada saat proyek pembangunan itu dilaksanakan agar masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah tidak pernah memihak kepada siapa-siapa”.

Merujuk pada gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan rumah ibadah di desa punya bertanggung jawab penuh pada tatanan kehidupan masyarakat desa, Kepala Desa harus bisa memotivasi masyarakat maupun aparat agar keberlangsungan pembangunan dapat terus berlanjut pada tahap yang lebih maju. Tujuannya adalah menjadikan desa semakin maju seperti apa yang di cita citakan dan kehidupan masyarakat semakin membaik demi kemajuan bersama. Wawancara 11 Juli bersama bapak HD sebagai sekretaris desa mengatakan bahwa:

“...Kami (pemerintah desa) selalu berupaya untuk meningkatkan empati dari masyarakat dengan turut membantu atau menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat dari warga. Selain kegiatan di atas, dalam rangka meningkatkan pembangunan di dalam desa pemerintah juga menyelenggarakan kegiatan yang mengolahrakan masyarakat, karena selain meningkatkan empati, hal tersebut juga berfungsi untuk mendukung minat dan bakat generasi muda”.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti di atas, harus adanya transparansi dan pembagian beban tugas yang merata pada tatanan pemerintah, yang mana hal ini bermaksud agar dalam sebuah pembangunan keterlibatan masyarakat harus di prioritaskan agar berhasil atau tidaknya suatu pembangunan menjadi bahan refleksi bersama dan tidak terjadi penolakan di dalam kehidupan tatanan tersebut. Kondisi masyarakat yang SDM-nya masih rendah memang menjadi kendala untuk pihak pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tetapi seharusnya hal ini tidak boleh di jadikan beban oleh pemerintah karena di dalam diri pemerintah harusnya ada atribut untuk memanfaatkan situasi yang ada menjadi suatu hal yang mengarah pada tatanan hidup yang lebih baik. Hal yang perlu di perbaiki adalah *mindset* dari pemerintah itu sendiri, karena masyarakat hanya sebagai wadah kebijakan dan menjadi alat pendukung kebijakan.

Dengan demikian, peran gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program pembangunan irigasi, jalan tani dan rumah ibadah di Desa Tarawali menjadi sangat perlu ditingkatkan, yang mana terlihat dari belum maksimalnya peran pemerintah dalam mengkoordinasikan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini dinilai penting karena tujuan dari sebuah pembangunan bukan hanya kepada hasil akhir, namun *outcome* dari pembangunan tersebut harus bisa dirasakan bagi masyarakat mulai dari segi fungsi pembangunan infrastruktur sampai kepada pemahaman yang baik tentang pembangunan itu terwujud. Faktor lain yang menjadi penghambat pemimpin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah ego dari masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah tidak pernah adil dalam membangun wilayah, rendahnya SDM masyarakat, dan kesibukan masyarakat pada pekerjaan masing-masing.

Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pembangunan irigasi, jalan tani, dan rumah ibadah di Desa Tarawali adalah rendahnya SDM masyarakat yang mana terbukti dengan rendahnya partisipasi masyarakat pada pembangunan tersebut. Masyarakat desa Tarawali sering kali hanya menyumbangkan tenaga dalam suatu pembangunan, dengan demikian pemerintah sering kali mengalami kesulitan menentukan arah kebijakan suatu pembangunan karena mengalami kurangnya usul saran dari masyarakat saat suatu program itu di jalankan. Hal semacam ini sudah menjadi terbiasa sehingga dalam tubuh masyarakat menganggap bahwa usul dan saran bukan merupakan tanggung jawab mereka dan jika terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan, masyarakat hanya akan saling menyalahkan tanpa pernah terlibat dalam proses perencanaan. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani memberikan pengaruh cukup signifikan karena dari 228 jumlah KK yang ada di Desa Tarawali seharusnya tercipta sebuah kemudahan dalam membangun desa. Kepala desa sebagai pemimpin selain dilihat dari bagaimana indikator gaya kepemimpinan terlaksana namun juga harus memperhatikan bagaimana seorang kepala desa dalam *me-LEADER* (Hariati, 2018), dengan memperhatikan atribut yang terdapat di dalamnya seperti; membangkitkan loyalitas aparat dan masyarakat, mengedukasi aparat dan

masyarakat, memberikan saran dan nasehat, dan memberikan keteladanan demi tercapainya cita-cita menjadikan desa semakin maju.

Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Pembangunan Irigasi, Jalan Tani, dan Rumah Ibadah pada Tahun 2016-2019 di Desa Tarawali

a) Partisipasi Inisiasi (*Inisiation Participation*)

Inisiatif yang dimaksudkan adalah bagaimana proyek itu di laksanakan dengan melihat peranan pemerintah maupun masyarakat sebagai inisiator pada perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Disini yang menjadi inisiatif adalah pemerintah, masyarakat hanya sebagai aktor pelaksana sehingga sumbangsih masyarakat hanya pada saat pelaksanaan. Dengan demikian maka peranan masyarakat sebagai partisipasi inisiasi tidak ada, yang mana hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada proyek pembangunan irigasi di desa Tarawali pada tahun 2016-2019.

Pada proyek pembangunan jalan tani pemerintah dan masyarakat bekerja sama mulai dari pengusulan sampai pada saat pembangunan, hal menunjukkan nilai partisipasi yang tinggi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan, namun bersama pemerintah masyarakat sudah mampu menentukan arah pembangunan itu di laksanakan. Meskipun masih menggunakan jalan tanah, pembangunan ini tentunya akan mengerucut pada suatu pembangunan yang lebih baik lagi di masa depan apa bila pemerintah dan masyarakat selalu bekerja sama.

Dalam pembangunan rumah ibadah masyarakat bekerja sama dengan pemerintah, yang sebelumnya sudah tidak mampu menampung umat yang kian meningkat sehingga rumah ibadah harus di pindahkan dan di bangun dengan ukuran yang lebih besar. Pemindahan dan pembangunan tersebut merupakan bentuk inisiatif dari masyarakat dan pemerintah yang mana hasil dari partisipasi dari kedua belah pihak mampu membuahkan hasil yang baik dan dapat memfasilitasi kebutuhan umat beragama yang berada di Desa Tarawali.

b) Partisipasi Legitimasi (*Legitimation Participation*)

Peran masyarakat hanya sebagai pembicara pada pembangunan irigasi hampir tidak ada

karena yang memelopori pembangunan tersebut adalah pemerintah dan masyarakat tidak ada yang melibatkan diri pada pembangunan tersebut. Sedangkan, pembangunan jalan tani berhasil dibangun, namun ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan pihak pemerintah tentang bagaimana partisipasi legitimasi ini bisa dihindari, karena dalam proyek tersebut masih banyak pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah masih berada pada tahapan ini.

Sebagai bahan acuan, program pembangunan jalan tani tersebut sudah mau berjalan namun masih banyak pihak yang seolah masih membutuhkan validasi lebih terhadap apa yang di bangun sehingga berdampak pada sedikit terganggunya pembangunan tersebut dan memunculkan keraguan dalam diri masyarakat tentang keputusan yang sudah di buat atas pembangunan jalan tani ini.

Pembicaraan mengenai suatu pembangunan sudah menjadi lumrah di setiap kalangan baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Dalam pembangunan rumah ibadah di desa Tarawali, masih banyak masyarakat yang berada pada tahapan ini, hal ini dikarenakan banyak masyarakat maupun pemerintah yang masih rendah tingkat pendidikannya yang kemudian berdampak pada tahapan partisipasi yang diperoleh masyarakat masih banyak berada pada tahapan legitimasi.

c) Partisipasi Eksekusi (*Execution Participation*)

Pemerintah menempatkan masyarakat sebagai aktor pelaksana pada pembangunan irigasi, namun dalam penerapannya masyarakat tidak melakukan apa-apa karena dalam program pembangunan tersebut tidak ada tenaga ahli yang mengepaloi pembangunan karena terbatasnya anggaran. Sedangkan, pada pembangunan jalan tani di Desa Tarawali masyarakat masih cenderung lebih banyak berada pada tahapan partisipasi ini, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang sibuk di sawah dan ladang dan tidak sempat memiliki waktu untuk berkontribusi secara total pada pembangunan jalan tani tersebut.

Menjadi pelaksana seolah sudah menjadi kebiasaan dalam tatanan kehidupan masyarakat desa di Desa Tarawali. Dalam pembangunan rumah ibadah tersebut yang mendasarinya adalah persamaan keyakinan sehingga pemerintah mampu dengan mudah mengajak

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannya. Meskipun pembangunan itu telah selesai pemerintah selalu berupaya dengan meningkatkan kemampuan aparat untuk mampu memotivasi di sendiri dan masyarakat tentang betapa pentingnya partisipasi bagi suatu pembangunan.

PENUTUP

Berdasarkan data pembangunan fisik, hasil wawancara, dan uraian pembahasan, maka dalam penulisan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, komunikasi menjadi kunci terlaksananya pembangunan yang terjadi di Desa Tarawali. Komunikasi dari seorang pemimpin sangat dibutuhkan agar pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan dapat di tingkatkan guna menjadikan desa Tarawali menjadi desa yang unggul dan mandiri dari segi pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya lainnya. Namun berhubung hal tersebut terjadi di kehidupan masyarakat pedesaan yang tingkat pendidikannya masih di bawah rata-rata. Terlebih lagi masyarakat desa Tarawali yang lebih banyak bekerja di sawah dan ladang akan mengalami kesulitan untuk memahami apa arti dari komunikasi tersebut, masyarakat akan lebih mudah memahami bila ada dampak positif yang sudah di berikan oleh pemerintah sebelum program itu di jalankan.

Kedua, tanggung jawab. Terlibat dalam partisipasi dan terlibat dalam proses manajemen menjadi instrumen penting yang mendukung terlaksananya sebuah program atau kegiatan. Tanggung jawab seorang Kepala Desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa adalah sebuah hal yang tidak dapat di kessampingkan, namun ada hal penting yang perlu diingat ialah dengan adanya tanggung jawab tersebut roda pemerintahan tetap berjalan pada poros pemerintahan. Yang di maksud dengan tetap berjalan pada poros pemerintahan ialah segala urusan pemerintah tetap dalam koridor dan tidak merugikan masyarakat atau dengan tidak mementingkan kelompok atau golongan.

Ketiga, motivasi. Sikap atau perilaku pemimpin sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan, melalui hasil wawancara peneliti dengan sejumlah informan dapat disimpulkan bahwa sikap para aparat desa sudah cukup baik, dan bertanggung jawab dengan situasi yang ada di tengah masyarakat Desa Tarawali. Motivasi lahir dari kesadaran individu maupun kelompok dalam

meningkatkan pembangunan di desa. Merujuk pada gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan fisik desa punya bertanggung jawab penuh pada tatanan kehidupan masyarakat desa, seorang Kepala Desa harus bisa memotivasi masyarakat maupun aparat agar keberlangsungan pembangunan dapat terus berlanjut pada tahap yang lebih maju. Tujuannya adalah menjadikan desa semakin maju seperti apa yang di cita-citakan dan kehidupan masyarakat semakin membaik demi kemajuan negeri dan tanah air.

Jenis partisipasi masyarakat Desa Tarawali yaitu partisipasi inisiasi karena pembangunan irigasi, jalan tani, dan rumah ibadah menempatkan masyarakat sebagai inisiator, sebab pembangunan didasari pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi legitimasi masyarakat hanya menjadi pembicara pada pembangunan irigasi, sedangkan pada pembangunan jalan tani dan rumah ibadah partisipasi masyarakat cukup baik, namun masih kurang karena faktor kualitas SDM. Pada partisipasi eksekusi pembangunan irigasi masyarakat tidak melakukan apa-apa, sedangkan pada pembangunan jalan tani dan rumah ibadah masyarakat masih cukup berkontribusi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Peneliti juga melakukan penyederhanaan pertanyaan supaya dapat dipahami responden. Diharapkan penelitian berikutnya mengisi kekurangan penelitian ini pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan gaya kepemimpinan kepala desa khususnya Desa Tarawali.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, N., & Sasmito, C. (2021). Peranan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *REFORMASI*, 11(2), 233–243. <https://doi.org/10.33366/rfr.v11i2.2866>
- BPS. (2020). *Kecamatan Soa Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Ghufon, G. (2020). Teori-Teori Kepemimpinan. *Fenomena*, 19(1), 73–79.

<https://doi.org/10.35719/fenomena.v19i1.34>

- Hariati, T. (2018). *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi pada Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Kartasasmita, G. (2001). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidesindo.
- Kartono, K. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UIP.
- Pasaribu, S. B., Goestjahjanti, F. S., Srinita, S., Novitasari, D., & Haryanto, B. (2022). The Role of Situational Leadership on Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior (OCB), and Employee Performance. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.896539>
- Rahman, F. (2021). *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Di Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riadi, M. (2019). *Kualitas Produk (Pengertian, Manfaat, Dimensi, Perspektif dan Tingkatan)*. Kajian Pustaka.
- RKPD Kabupaten Ngada, (2018).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarna, A. (2016). *Bentuk dan Jenis Partisipasi*. Webiste Desa Ciburial.

Thoha, M. (2007). *Kepemimpinan dan Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada.

UU No. 25 tahun 2004. (2004). *UU No. 25 tahun 2004*. Sekretariat Negara.